



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang	: 2010-2011
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 25 Mei 2011.
Pukul	: 14.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Penjelasan Pemerintah mengenai peningkatan pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan; 2. Pengembangan Infrastruktur dan kesejahteraan di daerah transmigrasi; 3. Pembahasan RKA-KL dan RKP Tahun 2012.
Ketua Rapat	: dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningsih/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota	: 41 orang dari 47 Anggota Komisi IX DPR RI 2 orang izin.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dibuka pukul 14.20 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Paparan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI antara lain :

- a. Personil Pengawasan Ketenagakerjaan
 - Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan = 2.384 org
 - Kualifikasi Pengawas Ketenagakerjaan :
 - Pengawas Umum = 1.460 org
 - Pengawas Spesialis = 361 org

- Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) = 563 org

b. Ratio kebutuhan Pengawas Ketenagakerjaan, dari 1 orang Pengawas idealnya mengawasi 5 perusahaan dalam satu bulan atau 60 kali pemeriksaan setahun.

c. Profil Pengawasan Ketenagakerjaan

- Jumlah Perusahaan (UU 7/81 dan Permenakertrans No. 09/2005 : 216.547 prsh
Sensus Ekonomi (BPS th 2006) : 3.796.461 prsh
 - Jumlah Pekerja : 108,207 juta
 - Laki-laki : 67,462 juta
 - Perempuan : 40,745 juta
- (data BPS Agustus 2010)
- Seluruh Peralatan dan Alat Produksi yang digunakan dalam proses produksi, antara lain perkakas kerja, mesin, pesawat, instalasi dan bahan berbahaya dan beracun

d. Organisasi Pengawasan Ketenagakerjaan :

- 1) Jumlah Dinas Ketenagakerjaan di Kab/Kota = 506 Kab/Kota
Penyebaran Pengawas Ketenagakerjaan :
 - Disnaker yg memiliki Pengawas = 304 dinas
 - Disnaker yg blm memiliki Pengawas = 202 dinas

2) Tingkatan Unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan didaerah tidak seragam ada eselon III dan ada yang hanya pada eselon IV.

3) Belum semua daerah mengangkat Pengawas Ketenagakerjaan pada jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai Kepmen PAN No. 19 Tahun 2010, serta terjadi *Disfunction dan Displacement*.

e. Penguatan Kelembagaan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :

- 1) Pemberdayaan Perusahaan Jasa Pembinaan K3 dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas personil K3 sebanyak 14,736 orang yang terdiri dari Ahli K3, Dokter, Petugas, Operator, dan Teknisi.
- 2) Pelaksanaan pembinaan perusahaan jasa K3 sebanyak 25 perusahaan.
- 3) Kerjasama dengan lintas sektor (Ditjen Hubla, PU, Migas, Kesehatan, Diknas, Petanian DLL)
- 4) Peningkatan kemampuan / kompetensi pengawas spesialis serta meningkatkan jumlah personil K3 telah dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi maupun dengan lembaga-lembaga diklat yaitu :
 - a. Institut Teknologi Surabaya (ITS)
 - b. Universitas Indonesia
 - c. Universitas Brawijaya
 - d. Universitas Negeri Solo
 - e. Universitas Airlangga
 - f. Universitas Sumatera Utara
 - g. Balai Diklat Sungai Gerong Palembang (PT. Pertamina)

- 5) Peningkatan kerjasama internasional di bidang K3 melalui program KOSHA dan ASEM:
- 6) Tindak lanjut penandatanganan *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi tanggal 13 April 2010 meliputi penyusunan tim kelompok kerja (Pokja) antara Direktorat Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan BP Migas dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Kelompok kerja yang membidangi Tenaga Kerja Asing
 - b. Kelompok kerja yang membidangi Jamsostek dan kesejahteraan
 - c. Kelompok kerja yang membidangi Waktu Kerja dan Waktu Istirahat
 - d. Kelompok kerja yang membidangi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Ahli Migas di Luar Negeri
 - e. Kelompok kerja bidang K3 yang meliputi : Manajemen K3, Personil K3, Peralatan, dan Kesehatan
- f. Tantangan yang dihadapi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI meliputi:
 - 1) Kuantitas dan kualitas terbatas
 - 2) Kendali operasional tidak pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 3) Jenjang karir, kepangkatan pengawas ketenagakerjaan banyak mengalami hambatan
 - 4) Keberanian untuk melakukan penyidikan hukum ketenagakerjaan masih rendah
 - 5) Anggaran belum mencukupi untuk membiayai kegiatan pokok
 - 6) Masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan
 - 7) Angka kecelakaan kerja relatif cukup tinggi
 - 8) Banyaknya anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- g. Kegiatan Strategis Tahun 2011 adalah :
 - 1) Percepatan Pertambahan Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan
 - a) APBN 3 Angkatan : 90 org
 - b) Kerjasama PT. Jamsostek 1 Akt : 30 org
 - c) APBD (seperti di Jawa Timur 1 Angkt : 30 org , Prov. Riau 1 Angkt : 30 org dan Prov. DKI 1 Angkt : 30 org)
 - 2) Kerjasama Luar Negeri yang dilaksanakan :
 - a) Pertemuan Asia Eropa Bid. K3 (ASEM) 45 negara
 - b) Pertemuan *Working Group on HIV/AIDS* se-ASEAN
 - c) Kerjasama dengan ILO tentang Pembangunan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan yang modern meliputi peningkatan kapabilitas Pengawas Ketenagakerjaan, Jaringan Informasi Wasnaker dan pertemuan Tripartit Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - 3) Rakornas Pengawas Ketenagakerjaan dan PT. Jamsostek seluruh Indonesia dalam rangka Pencanangan tahun 2011 sebagai tahun penegakan hukum ketenagakerjaan.

- 4) Sosialisasi SMK3 dan norma K3 terkait Penggunaan Kompor LPG 3 Kg Kepada Masyarakat dilaksanakan berdasarkan APBN, APBD dan Kerjasama dgn Sektor terkait.

h. Kegiatan Prioritas Tahun 2012 adalah :

- 1) Menambah jumlah pengawas ketenagakerjaan
- 2) Membangun dan mengembangkan jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan
- 3) Mengembangkan koordinasi melalui rapat koordinasi kab./kota, provinsi dan nasional
- 4) Mengembangkan kapasitas kerja pengawas ketenagakerjaan kab./kota, provinsi dan pusat
- 5) Kerjasama pembinaan jenjang karir pengawas ketenagakerjaan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Daerah
- 6) Penghapusan diskriminasi dan perlindungan fungsi reproduksi bagi pekerja perempuan
- 7) Menarik anak dari bentuk pekerjaan terburuk untuk anak,
- 8) Kerja sama bilateral maupun multilateral bidang pengawasan ketenagakerjaan (ILO, JICA, KOSHA dan ASEAN OSHNET)
- 9) Bimbingan penerapan norma ketenagakerjaan di UMKM dan sektor informal
- 10) Bantuan teknis pemeriksaan/pengujian dan penyidikan serta peningkatan peralatan teknis pemeriksaan dan pengujian
- 11) Pembudayaan K3, penurunan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
- 12) Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 13) Peningkatan kepesertaan Jamsostek,
- 14) Peningkatan pengawasan norma hubungan kerja (pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa pekerja/buruh).

i. Usulan Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (KPB/KTM) :

- 1) Diluar unsur-unsur pembentuk kawasan transmigrasi (PTB dan desa-desa lama) dibutuhkan pembiayaan untuk pembangunan pusat KPB/KTM dan infrastruktur kawasan (intra dan antar kawasan).
- 2) Berdasarkan kondisi selama ini diperkirakan untuk perwujudan pusat KPB berikut infrastruktur intra dan antar kawasan paling tidak dibutuhkan investasi anggaran negara sebesar Rp. 25 Milyar per KPB/KTM per tahun.
- 3) Program P2MKT untuk memenuhi kebutuhan KTM antara lain:
 - o Permintaan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk percepatan pembangunan KTM dan peningkatan kualitas permukiman transmigrasi dibutuhkan Rp. 1.155.296.700.000,-
 - o Alokasi anggaran tahun 2011 hanya Rp. 767.296.700.000,- sehingga sasaran diharapkan tidak dapat tercapai
 - o Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Ditjen P2MKT membutuhkan tambahan anggaran minimal Rp. 388 miliar.

j. Kebijakan Bidang ketenagakerjaan meliputi :

Dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan posisi tawar para pekerja, meningkatkan produktivitas pekerja, meningkatkan hubungan pekerja dan pemberi kerja, dan perlindungan terhadap pekerja:

- Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang layak (*decent work*), yaitu lapangan kerja produktif dengan perlindungan dan jaminan sosial yang memadai;
- Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan;
- Meningkatkan kondisi dan mekanisme hubungan industrial untuk mendorong kesempatan kerja;
- Menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama), sesuai Hukum Internasional;
- Mengembangkan Jaminan Sosial dan pemberdayaan pekerja;
- Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas;
- Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah;
- Menyempurnakan kebijakan migrasi;
- Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja.

k. Kebijakan Bidang Ketransmigrasian meliputi :

Diprioritaskan pada upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam melalui pengintegrasian pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai *hinterland* dengan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah, arah kebijakan yang ditetapkan adalah:

- 1) Pelaksanaan persebaran penduduk;
- 2) Koordinasi dan integrasi pembangunan kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan kawasan strategis;
- 3) Pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan;
- 4) Peningkatan daya tarik desa;
- 5) Membangun keterkaitan antara kota dan desa;
- 6) Percepatan pembangunan kawasan tertinggal;
- 7) Percepatan pembangunan kawasan perbatasan.

l. Kondisi Ketransmigrasian :

Transmigrasi berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan dan pengembangan wilayah :

- 1) Sekitar 2,2 juta KK (\pm 8,8 juta) orang miskin dan penganggur memperoleh peluang berusaha dan kesempatan kerja;
- 2) Dibangun dan dikembangkan sekitar 3.325 desa (88 desa menjadi ibukota kab/kota, 235 desa menjadi ibukota kecamatan);
- 3) Membuka areal produksi baru di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan sekira 3,6 juta Ha (300.000 Ha diantaranya di bidang perkebunan yang mampu menyerap sekitar 150.000 KK setara 255.000 KK);
- 4) Penyelenggaraan transmigrasi mengalami gelombang pasang surut seiring dengan dinamika perubahan lingkungan strategis;

m. Isu Penting Sebagai Latar Belakang Perumusan Konsep Transmigrasi ke depan :

- 1) Berlangsungnya ketimpangan persebaran penduduk antar pulau atau antar provinsi terkait dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- 2) Terjadinya kesenjangan pertumbuhan perkonomian antarwilayah;
- 3) Timbulnya krisis ketahanan pangan nasional;
- 4) Munculnya krisis sumber daya bahan bakar minyak;
- 5) Telah dilaksanakannya keputusan politik tentang desentralisasi atau otonomi daerah;
- 6) Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kelangkaan lapangan kerja.

n. Pagu Indikatif Kemenakertrans Tahun 2012 serta usulan inisiatif baru Kemenakertrans Tahun 2012 adalah :

(dalam jutaan rupiah)

PROGRAM	Kebutuhan Anggaran Tahun 2012		
	Usulan Kebutuhan (Base line + Inisiatif Baru) = (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	Kekurangan (Rp)
1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas	2.855.800,00	966.122,30	1.889.677,70
2. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	2.054.200,00	694.740,00	1.359.460,00
3. Program Pengemb. Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	289.990,00	231.000,00	58.990,00
4. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengemb. Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	310.100,00	232.540,00	77.560,00
5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1.152.692,00	851.012,00	301.680,00
6. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	1.367.296,00	767.296,00	600.000,00
7. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kemenakertrans	667.868,95	280.500,00	387.368,95
8. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenakertrans	49.852,00	45.320,00	4.532,00
9. Program Litbang Kemenakertrans	128.440,00	65.198,00	63.242,00
Total	8.876.238,95	4.133.728,30	4.742.510,65

2. Kemenakertrans perlu lebih memperjelas Renstra tentang ketenagakerjaan dan perlu menyiapkan strategi yang efektif untuk mengantisipasi munculnya masalah pengangguran, termasuk mengantisipasi berlakunya *Asean China Free Trade Association (ACFTA)*, yang dikhawatirkan tidak hanya barang-barang dari China yang memenuhi Indonesia tetapi juga kehadiran tenaga kerja China yang akan bekerja di Indonesia.

3. Kemenakertrans RI harus segera melakukan pengangkatan tenaga pengawas ketenagakerjaan dengan mengoptimalkan peningkatan kualitas SDM, melibatkan peran serta masyarakat, dan penguatan kelembagaan pengawas ketenagakerjaan sesuai Perpres 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.
4. Kemenakertrans agar memanfaatkan teknologi informasi yang bersifat *on line* terkait informasi lowongan kerja, sehingga masyarakat awam mudah untuk mengakses dan memanfaatkan informasi tersebut.
5. Kemenakertrans RI diminta untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional terkait dengan penyusunan kurikulum bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sehingga diharapkan lulusan SMK dapat mempunyai ketrampilan yang dibutuhkan pasar kerja atau siap kerja.
6. Pengembangan kawasan transmigrasi, termasuk pengembangan 22 KTM diusulkan agar mempertimbangkan kajian para pakar terkait dengan kondisi sosial ekonomi dan kemanfaatan program tersebut untuk masyarakat sekitarnya. Pembangunan KTM yang selama ini dilaksanakan cenderung sifatnya seremonial, seperti pembangunan monumen, gapura dan jalan-jalan boulevard, sehingga tidak langsung menyentuh kebutuhan transmigran dan masyarakat sekitar. Anggaran yang tersedia dalam pembangunan KTM agar dikelola dengan lebih mendahulukan kepentingan transmigran dan masyarakat sekitar.
7. Untuk meningkatkan kapasitas para transmigran dalam mengelola dan memanfaatkan lahan, Kemenakertrans diusulkan untuk membuat program pendampingan, seperti pendampingan oleh unsur perguruan tinggi sehingga para transmigran mendapatkan tambahan ketrampilan sesuai kebutuhan.
8. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI diminta untuk melakukan tindakan hukum (*law enforcement*) terhadap perusahaan yang nakal, termasuk perusahaan yang tidak memberikan hak-haknya secara layak, perusahaan yang menyalahi ketentuan izin produksi serta perusahaan yang menerapkan praktek *outsourcing* yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
9. Kemenakertrans RI telah ditunjuk oleh Presiden sebagai salah satu wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang BPJS, untuk itu Kemenakertrans RI harus dapat terus mengawal pembahasan RUU tentang BPJS hingga disahkan menjadi Undang-undang.

III. KESIMPULAN

1. Usulan inisiatif baru anggaran Tahun 2012 dari Kemenakertrans RI sebesar Rp. 8.876.238,95 (triliun) yang merupakan tambahan dari pagu indikatif tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 4.133.728.300.000,- (triliun) akan dibahas lebih lanjut oleh Komisi IX DPR RI.
2. Komisi IX DPR RI mendorong Kemenakertrans RI untuk segera melakukan pengangkatan pengawas ketenagakerjaan dengan mengoptimalkan peningkatan kualitas SDM, melibatkan

peran serta masyarakat, dan penguatan kelembagaan pengawas ketenagakerjaan sesuai Perpres 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

3. Komisi IX DPR RI mendesak Kemenakertrans RI untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah transmigrasi di seluruh Indonesia dengan memperhatikan dan menyesuaikan rencana program pengembangan dan percepatan pembangunan infrastruktur dengan keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di daerah transmigrasi serta menyelesaikan kasus-kasus yang dialami oleh para transmigran seperti kasus yang terjadi di UPT KTM Kecamatan Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir di Provinsi Sumsel.
4. Komisi IX DPR RI meminta Kemenakertrans RI untuk mengawal pembahasan RUU tentang BPJS hingga disahkan menjadi UU.
5. Komisi IX DPR RI meminta Kemenakertrans RI untuk menyerahkan secara tertulis jawaban yang lebih lengkap atas pertanyaan yang disampaikan oleh seluruh Anggota Komisi IX DPR RI.

Rapat diakhiri pukul 16.30 WIB

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Ketua,



dr. RIBKA TJIPTANING